



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT

UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAKARI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 504189

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.895.300.000

1. Tanah Seluas 19.992 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI

Rp. 549.800.000

2. Tanah Seluas 18.560 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI

Rp. 1.528.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 669 m²/280 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

4. Tanah Seluas 20.000 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

5. Tanah Seluas 20.000 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

6. Tanah Seluas 20.000 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

7. Tanah Seluas 16.800 m² di KAB / KOTA MUNA, HASIL SENDIRI Rp. 1.528.000.000

8. Tanah Seluas 779 m² di KAB / KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 389.500.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 840 m²/88 m² di KAB / KOTA MUNA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.000.000



1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.	
1.000.000	
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 29.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp. 43.931.044
F. HARTA LAINNYA	Rp. 98.395.119
Sub Total	Rp. 6.067.626.163
III. HUTANG	Rp. 159.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp. 5.908.626.163

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.